



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK: xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Karang Agung, 07 Maret 1975, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon I;

Pemohon II NIK: xxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Karang Agung, 09 Juni 1977, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Pemohon II;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.ME, tanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 28 April 1995;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus Perawan dalam

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.ME



usia 20 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II sebagai wali nasab yang bernama Wali Pemohon II, dan dihadiri oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1. Saksi Nikah 1 dan 2. Saksi Nikah 2;

3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. Anak 1;
2. Anak 2;
3. Anak 3;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;

8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abab;

9. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK), dan karena itu para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.ME



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 28 April 1995;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK xxxxxx dan NIK xxxxxx, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor xxxxxx tertanggal 28 April 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi Nikah 1, sebagai Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Karang Agung, pada tahun 1995, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;



- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama **Wali Pemohon II**;

-- Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah;

-----Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai;

-----Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah **Saksi Nikah 2** dan **saya sendiri**;

----Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **perawan**;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

-----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat;

-- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

-----Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk penerbitan akta nikah, Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Saksi Nikah 2, sebagai Tetangga Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Karang Agung, pada tahun 1995, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama **Wali Pemohon II**;

-- Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah;

-----Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai;

-----Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah **Saksi Nikah 1** dan **saya sendiri**;

----Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **perawan**;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

-----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat;

-- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

-----Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

-----Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai persyaratan untuk penerbitan akta nikah, Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.ME



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
4. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim dan pernikahan Para Pemohon belum terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada tahun 1995 di Desa Karang Agung Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dilaksanakan secara agama Islam;

Fakta Hukum

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 28 April 1995;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Kakak Kandung Pemohon II, yang merupakan wali nasab Pemohon II, telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
5. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal 28 April 1995 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam l'anatuth Tholibin juz IV halaman 254 yang Majelis ambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya pernikahan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa terkait tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka dengan mempertimbangkan alamat di mana Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang berada di Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Desa Karang Agung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) pada tanggal 28 April 1995;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp700.000,00 (*tujuh ratus ribu rupiah*);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) yang dilaksanakan dalam layanan Sidang Terpadu, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 M., bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1444 H., oleh **Yeni Kurniati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	700.000,00

Terbilang: **Tujuh ratus ribu rupiah.**

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2023/PA.ME